

Kajian Filologis atas Laporan Panitra Radyapustaka Tahun 1936: Transliterasi, Terjemahan, dan Analisis Nilai Budaya Surakarta

Nurudin Zanki

UIN Sunan Ampel Surabaya

Corresponding author: 03020223046@uinsa.ac.id

Iffah Nur Azizah

UIN Sunan Ampel Surabaya

03030223108@uinsa.ac.id

 <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.9.2.144-162>

Received: 2 January 2026; Accepted: 2 March 2026; Published: 16 March 2026

Abstract: This study examines the manuscript Palapuraning Panitra Nalika Dherek Pangarsa Tedhak Madura, a report written by a court secretary from the Radya Pustaka in 1936 under the order of Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya during a political visit to Hotel Oranje. The manuscript contains records of journeys, inspections of royal heirlooms, and cultural and political relations between the Surakarta nobility and other regions. This research employs philological and historical methods through the processes of transcription, translation, and interpretation of the Javanese text to make it more accessible and comprehensible. In addition, the study applies Homi K. Bhabha's theory of hybridity to examine the interaction between Javanese court traditions and the influence of colonial structures. The findings reveal that the manuscript is not merely an administrative report, but also reflects cultural values, political aspects, and the bureaucratic etiquette of the royal court in the early twentieth century. Furthermore, the report emphasizes the importance of royal heirlooms as symbols of honor and cultural identity. Therefore, this manuscript demonstrates the interconnected relationship between power, tradition, and cultural dynamics during the colonial period.

Keywords: *Arya Adiwijaya, Radya Pustaka, Surakarta, Palapuraning Panitra*

PENDAHULUAN

Warisan budaya tidak hanya tersimpan dalam bentuk benda-benda bersejarah seperti keris, gamelan, atau arca, tetapi juga dalam bentuk tulisan-tulisan lama yang merekam jejak kehidupan sosial, politik, dan budaya di masa lalu¹. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pelestarian tulisan-tulisan lama tersebut adalah Pahêman Radya Pustaka di Surakarta². Didirikan pada tahun 1890, lembaga ini berfungsi

¹ Salse-Rovira, dkk. (2024) "Universities, heritage, and non-museum institutions". *International Journal on Digital Libraries*. Volume 25, pages 603–622. <https://doi.org/10.1007/s00799-023-00383-0>

² Irsyad Eko Nuranto. (2010). *Sejarah Perkembangan Manajemen Musium Radyapustaka Tahun 1926-2008*. (Universitas Sebelas Maret). Diakses dari

How to cite: Zanki, N., and Azizah, I. N., "Kajian Filologis atas Laporan Panitra Radyapustaka Tahun 1936: Transliterasi, Terjemahan, dan Analisis Nilai Budaya Surakarta", *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 9, No. 2, (March 2026): 144–162. DOI: <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.9.2.144-162>

sebagai pusat dokumentasi dan pelestarian naskah Jawa klasik, arsip kerajaan, serta laporan-laporan administratif istana. Di antara koleksi pentingnya terdapat Naskah “*Palapuraning Panitra Nalika Dherek Pangarsa Tedhak Madura*” karangan R.M.NG. Prajakintaka, yang berisi catatan perjalanan seorang panitra³ (R.M.NG. Prajakintaka) dalam mendampingi seorang bangsawan Surakarta melakukan kunjungan politik ke Hotel Oranje pada tahun 1936.

Laporan ini merekam aktivitas kunjungan politik bangsawan Surakarta dan perjalanan pulang untuk mampir ke Giri untuk melihat pusaka, sehingga menjadi bukti adanya hubungan budaya dan politik antara kedua wilayah tersebut pada masa kolonial akhir. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana sebuah kerajaan di Jawa menjalin interaksi dengan daerah lain melalui budaya, khususnya pusaka yang berfungsi sebagai simbol legitimasi, identitas, dan hubungan kekuasaan. Dokumen ini belum dikaji dalam dari nilai budaya serta makna pertukaran pusaka itu sendiri. Kajian filologis terhadap manuskrip Nusantara dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa teks tradisional sering kali menjadi medium penyimpanan kearifan lokal dan simbol legitimasi budaya yang kompleks.⁴ Oleh karena itu, analisis nilai budaya dalam Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” menjadi penting untuk memahami fungsi pusaka sebagai identitas dan relasi kuasa antarbangsawan.

Beberapa penelitian sebelumnya memang sudah membahas naskah-naskah yang tersimpan di Radya Pustaka, misal pada naskah sama dengan berjudul penelitian *Kajian Struktural dan Nilai Religius dalam “Serat Palapuraning Panitra Nalika Dherek Pangarsa Tedhak Madura” karangan R.M.NG. Prajakintaka*⁵. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada struktur teks dan nilai religius, belum mengupas hubungan budaya dan relasi politik di dalam naskah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan studi-studi terdahulu yaitu (1) Penelitian ini menggunakan pendekatan filologis secara utuh, yang mencakup tiga tahap utama yaitu: transliterasi, terjemahan, dan analisis isi; (2) Penelitian ini menitikberatkan pada nilai-

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14124/Mjg4NjQ=/Sejarah-perkembangan-manajemen-Museum-Radyapustaka-tahun-1926-2008-61.pdf>

³ Juru tulis kerajaan yang mendampingi pimpinan

⁴ Nurul Baiti Rohmah dan Uman Rejo, “Kajian Filologi dan Kearifan Budaya Lokal dalam Teks Manuskrip Keislaman *Layang Iman Sujana*,” *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik* 25, no. 1 (2024).

⁵ Dianto Sumangku Panemu. (2015). “Kajian Struktural dan Nilai Religius dalam “Serat Palapuraning Panitra Nalika Dherek Pangarsa Tedhak Madura” karangan R.M.NG. Prajakintaka”. *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*. Vol. 06 No. 05. <https://s11nk.com/kSzmf>

nilai budaya dalam penelusuran pusaka antara dua daerah berbeda; (3) Analisis nilai budaya dilakukan dengan teori hibriditas Homi K. Bhabha, untuk memahami bagaimana budaya asli Jawa dan kolonial saling berinteraksi dan membentuk identitas baru yang bercampur (hibrid).

Teori hibriditas Homi K. Bhabha menjelaskan bahwa ketika dua budaya bertemu, yang pada konteks ini budaya Jawa istana dan budaya Jawa Timur pesisir terjadi proses percampuran yang tidak sekadar peniruan atau dominasi, melainkan pembentukan identitas baru melalui negosiasi makna. Pada perspektif kajian postkolonial, konsep hibriditas menunjukkan bahwa pertemuan budaya menghasilkan ruang negosiasi makna yang membentuk identitas baru.⁶ Dalam Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*”, teori ini membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya seperti penghormatan terhadap pusaka, tata krama bangsawan, dan simbol kekuasaan mengalami percampuran antara gaya. Dengan teori ini, teks naskah tidak hanya dibaca sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai cermin dinamika sosial dan budaya pada masa kolonial akhir di Jawa.

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini Adalah bagaimana hasil transliterasi dan terjemahan Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*”, serta bagaimana nilai-nilai budaya dalam perjalanan kunjungan Pangeran Arya Adiwijaya dapat dipahami melalui teori hibriditas? Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama: (1)Menyajikan transliterasi dan terjemahan dari Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*”; (2) Mengungkap nilai-nilai budaya yang tercermin dalam teks, seperti konsep kehormatan, legitimasi pusaka, serta relasi kekuasaan antarbangsawan; (3) Menafsirkan proses pertukaran budaya pada kegiatan kunjungan politik bangsawan Surakarta ini dengan teori hibriditas untuk memahami pembentukan identitas budaya yang baru.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode filologi deskriptif-analitis⁷. Langkah-langkahnya meliputi: Inventarisasi dan identifikasi naskah, yakni

⁶ Homi K. Bhabha, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994).

⁷ Nurul Baiti Rohmah dan Uman Rejo, “Kajian Filologi dan Kearifan Budaya Lokal dalam Teks Manuskrip Keislaman *Layang Iman Sujana*,” *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik* 25, no. 1 (2024).

menelusuri keberadaan naskah Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” di koleksi Radya Pustaka; Transliterasi, yaitu mengalihaksarakan teks dari huruf Jawa ke huruf Latin; Terjemahan, yaitu mengubah bahasa asli naskah ke dalam bahasa Indonesia yang jelas dan sederhana tanpa menghilangkan makna aslinya; Analisis isi dan nilai budaya, yaitu menelusuri nilai-nilai budaya yang muncul dalam teks, seperti hubungan antara penguasa dan makna pusaka; Interpretasi teoritis, yaitu menerapkan teori hibriditas untuk menafsirkan pertemuan budaya dua daerah di Jawa dan jga kolonial yang terekam dalam teks laporan tersebut.

Pendekatan filologi deskriptif-analitis yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan perkembangan kajian tekstologi manuskrip Nusantara yang menekankan pentingnya tahapan inventarisasi, deskripsi naskah, transliterasi, terjemahan, serta analisis konteks budaya dalam memahami teks lama⁸. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa filologi tidak hanya bertujuan menyusun teks yang bersih secara tekstual, tetapi juga mengungkap nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya⁹. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan pada Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” yang memuat dimensi budaya dan relasi kekuasaan.

Akhirnya, fokus utama dari penelitian ini akan diarahkan pada analisis nilai budaya dalam penelusuran perjalanan politik Pangeran Arya Adiwijaya, dengan menjadikan teori hibriditas sebagai alat untuk melihat bahwa pertemuan dua budaya selalu melahirkan ruang baru yang kaya makna dan layak untuk dipahami kembali dalam konteks sejarah kebudayaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Naskah

Naskah berjudul *Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura* merupakan salah satu dokumen penting yang tersimpan dalam arsip digital Yayasan Sastra Lestari, dengan nomor koleksi #1758. Naskah ini berbentuk prosa naratif dalam

⁸ Nova Fitri Nur Sholehah, F. A. Alfiana, L. N. F. Dewi, V. R. A. Wardani, dan A. A. Khoiri, “Ancient Manuscript Textology in the Archipelago: A Comparative Analysis of Objects, Languages, and Methods in Philological Studies,” *Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa* 13, no. 2 (2025).

⁹ M. Safi’i, “Tasawuf Jawa: Kajian Filologis terhadap Naskah *Suluk Ahya Ngulumodin*: Javanese Sufism: A Philological Study of *Suluk Ahya Ngulumodin*,” *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 9, no. 2 (2025): 347–362.

bahasa Jawa Tengahan yang ditulis menggunakan aksara Jawa. Berdasarkan data penanggalan dan konteks isinya, naskah ini disusun sekitar tahun 1936 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, seorang pejabat tinggi dalam lingkungan Pahêman Radya Pustaka di bawah naungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tradisi dokumentasi seperti ini merupakan bagian dari kesinambungan sistem birokrasi dan pencatatan istana Jawa yang bertahan hingga awal abad ke-20¹⁰.

Secara isi, naskah ini memuat laporan perjalanan seorang panitra atau juru tulis kerajaan yang mendampingi pimpinan, disebut sebagai pangarsa, dalam perjalanan resmi menuju Hotel Oranje. Laporan tersebut mencatat berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi selama perjalanan, pencatatan administrasi, serta catatan mengenai hubungan diplomatik dan budaya antara bangsawan Surakarta, termasuk saat perjalanan pulang terdapat peninjauan terhadap benda pusaka ke Giri. Karakter laporan semacam ini memperlihatkan bahwa teks tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai representasi budaya dan simbol legitimasi kekuasaan¹¹.

Melalui catatan ini, dapat dilihat bagaimana tradisi birokrasi dan dokumentasi di lingkungan keraton Jawa masih terpelihara dengan kuat pada masa transisi menuju modernitas di awal abad ke-20. Dalam kajian filologi kontemporer, naskah-naskah semacam ini dipahami sebagai sumber tekstual yang memuat informasi historis sekaligus nilai budaya yang tersirat dalam struktur bahasa dan gaya penulisannya¹².

Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” menjadi bentuk tulisan yang lahir dari tradisi istana, naskah ini memperlihatkan gaya bahasa yang formal dan sistematis khas laporan panitra, yang menjadi bagian dari tradisi tulis keraton. Pendekatan tekstologi Nusantara menekankan bahwa analisis terhadap bentuk, bahasa, dan struktur teks menjadi langkah penting untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya¹³.

¹⁰ Nova Fitri Nur Sholehah et al., “Ancient Manuscript Textology in the Archipelago: A Comparative Analysis of Objects, Languages, and Methods in Philological Studies,” *Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa* 13, no. 2 (2025).

¹¹ Nurul Baiti Rohmah dan Uman Rejo, “Kajian Filologi dan Kearifan Budaya Lokal dalam Teks Manuskrip Keislaman *Layang Iman Sujana*,” *SEMOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik* 25, no. 1 (2024).

¹² M. Safi'i, “Tasawuf Jawa: Kajian Filologis terhadap Naskah *Suluk Ahya Ngulumodin*,” *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 9, no. 2 (2025): 347–362.

¹³ Nova Fitri Nur Sholehah et al., “Ancient Manuscript Textology in the Archipelago: A Comparative Analysis of Objects, Languages, and Methods in Philological Studies,” *Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa* 13, no. 2 (2025)

Secara fisik, naskah ini kini hanya tersedia dalam bentuk digital hasil alih media dari arsip Website Yayasan Sastra Lestari. Proses digitalisasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2005 oleh Yayasan Sastra Lestari (Yasri) dalam proyek dokumentasi yang berfokus pada pelestarian naskah-naskah Jawa. Digitalisasi ini menunjukkan adanya transformasi media dari manuskrip fisik ke arsip digital, yang dalam kajian filologi modern dipandang sebagai upaya konservasi sekaligus perluasan akses terhadap warisan budaya tulis¹⁴.

Dalam katalog digital Yayasan Sastra Lestari, naskah ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu “Arsip dan Sejarah” serta “Kisah, Cerita, dan Kronikal,” menunjukkan bahwa naskah tersebut memiliki nilai ganda baik sebagai dokumen administratif maupun sebagai catatan naratif perjalanan sejarah. Dengan demikian, Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” menjadi salah satu naskah penting yang memperlihatkan kesinambungan tradisi tulis dan dokumentasi kerajaan Jawa di masa kolonial akhir, sekaligus menjadi cermin hubungan kebudayaan Surakarta saat itu (1963)

Transliterasi dan Terjemahan

Awit saking dhawuhipun pangarsaning Pahêman Radyapustaka Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, nalika dintên Jumungah kaping 17 Januari 1936, kula kadhawuhan nusul panjênênganipun tédhak Surabaya ngrumiyini andhèrèk wiyos dalêm Sampeyan Dalêm Inkgang Wicaksana Inkgang Sinuhun Kangjêng Susuhunan sakalihan pramèswari dalêm Gusti Kangjêng Ratu Êmas, tédhak martuwi gêrahipun Kangjêng Tuwan Guprênur ing Surakarta wontên panti roga ng Surabaya.

Atas perintah pimpinan Perpustakaan Radya Pustaka, Bandara Kanjeng Pangeran Arya Adiwijaya, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 1936, saya diperintahkan untuk menyusul beliau berangkat ke Surabaya guna mendahului mengikuti keberangkatan Sri Paduka yang Bijaksana, Kanjeng Susuhunan beserta permaisuri beliau, Gusti Kanjeng Ratu Emas, untuk menghadiri pesta perkawinan putra Gubernur di Surakarta yang diselenggarakan di rumah sakit Surabaya.

Angkat kula saking dalêmipun Kangjêng Radèn Mas Tumênggung Widaningrat, wanci jam 6 enjing, kadhèrèkakên numpak motor, titihan dalêm ingkang kagêm

¹⁴ Fitri Febriyanti dan M. S. Alawy, “Philological Analysis of Tafsiriyah Translations in Javanese Qur’an Manuscripts from a Nusantara Perspective,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 23, no. 1 (2025): 1–35.

andhungan wontên ing Surabaya, antawis jam 8 dumugi Dhusun Klithèh, Kadhistrikan Padhas Kabupatèn Bawi,[1] motor kèndêl botên sagêd malampah katiti priksa wontên ingkang risak prabotipun, dados dadak andadosi ngantos kalih jam satêngah sawêg rampung lajêng mangkat, dumugi Nganjuk risak malih, ugi dadak andadosi nanging namung sakêdhap lajêng mangkat, kala samantên jawah ragi dêrês dados lampahing motor karikatakên, dumugi Hotèl Oranyê palêrêban dalêm sampun wanci jam 1/2 4 sontên, Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ngêntosi wontên ngriku, kula lajêng kadhawuhan andhèrèk kondur dhatêng griyanipun ingkang putra mantu Mèstêr Dhoktor Subrata, kapanakên wontên kamar piyambak.

Saya berangkat dari kediaman Kanjeng Raden Mas Tumenggung Widaningrat pada pukul 6 pagi, ikut naik mobil, kendaraan beliau yang akan digunakan dalam perjalanan ke Surabaya. Sekitar pukul 8 tiba di Dusun Klitheh, Distrik Padhas, Kabupaten Bawi, mobil mogok tidak dapat berjalan karena diketahui ada peralatan yang rusak, maka segera diperbaiki hingga pukul setengah dua baru selesai, kemudian berangkat lagi. Sesampainya di Nganjuk, rusak lagi, juga segera diperbaiki namun hanya sebentar lalu berangkat lagi. Saat itu hujan deras turun terus-menerus, sehingga perjalanan mobil dipercepat, tiba di Hotel Oranje tempat peristirahatan beliau pada pukul setengah empat sore. Bandara Kanjeng Pangeran Arya Adiwijaya telah menunggu di sana. Saya kemudian diperintahkan untuk ikut kembali ke rumah putra mantu beliau, Meester Doktor Subrata, dan saya ditempatkan di kamar tersendiri.

Dintên Sabtu wanci jam 12 siyang, rawuh dalêm Sampeyan Dalêm Inkang Wicaksana Inkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan ing Surabaya, lèrêm sawatawis lajêng tédhak ing panti roga martuwi Kangjêng Tuwan Guprénur wau, namung sawatawis dangunipun lajêng kondur ing palêrêban dalêm Hotèl Oranyê.

Pada hari Sabtu pukul 12 siang, tiba Sri Paduka Yang Bijaksana, Kanjeng Susuhunan, di Surabaya. Setelah beristirahat sejenak, beliau kemudian pergi ke rumah sakit untuk menghadiri pesta perkawinan putra Gubernur tersebut, namun hanya sebentar lamanya lalu kembali ke tempat peristirahatan di Hotel Oranje

Sontênipun amêng-amêng, mampir ing griyanin[2] Mèsèstêr[3] Dhoktor Subrata, dangunipun watawis kalih jam, kondur ing palêrêban dalêm Hotèl Oranyê.

Sore harinya beliau berjalan-jalan, singgah di rumah Meester Doktor Subrata selama kira-kira dua jam, lalu kembali ke tempat peristirahatan di Hotel Oranje.

Dintênipun Akad, Sampeyan Dalêm Inggang Wicaksana Inggang Sinuhun Kangjêng Susuhunan, tédhak ing Kabupatèn Grésik, sarawuh dalêm dipun papagakên inggang Bupati Radèn Adipati Arya Suryawinata sagarwa, wontên antawising pandhapa kalihan pringgitan, sampeyan dalêm inggang wicaksana taksih wontên ing titihan, dhawuh dhatêng inggang bupati bilih badhe lajêng tédhak ing Giri, amargi putri dalêm Gusti Kangjêng Ratu Pambayun badhe jiarah dhatêng pasareanipun Sunan Giri, inggang bupati mangayubagya lajêng bidhal,

Pada hari Ahad, Sri Paduka Yang Bijaksana, Kanjeng Susuhunan, berangkat ke Kabupaten Gresik. Ketika beliau tiba, disambut oleh Bupati Raden Adipati Arya Suryawinata beserta istri, di antara pendapa dan pringgitan, Sri Paduka yang bijaksana masih berada di dalam kereta. Beliau memerintahkan kepada Bupati bahwa akan segera berangkat ke Giri, karena putri beliau, Gusti Kanjeng Ratu Pambayun, hendak berziarah ke makam Sunan Giri. Sang Bupati menyambut dengan penuh hormat, lalu berangkat.

Sarawuh dalêm ing Giri kèndêl wontên ngandhap, putri dalêm Gusti Kangjêng Ratu Pambayun kanthi inggang raka Bandara Kangjêng pangeran Arya Adiwijaya saha Bandara Kangjêng Pangeran Arya Purbanagara, punapadene inggang bakyu Bandara Radèn Ayu Cakradiningrat minggah ing pasarean, kadhèrèkakên para priyantun dalêm saha para abdi dalêm badhaya, punapadene para abdi dalêm panèwu mantri urdhênas inggang ngampil-ampil tindhih Radèn Mas Arya Bratadipura abdi dalêm bupati anom carik kasêpuhan,

Sesampainya beliau di Giri, kereta berhenti di bawah, sementara putri beliau, Gusti Kanjeng Ratu Pambayun, bersama kakandanya Bandara Kanjeng Pangeran Arya Adiwijaya dan Bandara Kanjeng Pangeran Arya Purbanagara, serta kakaknya Bandara Raden Ayu Cakradiningrat, naik ke makam, diiringi oleh para bangsawan dalam serta para abdi dalem badhaya, juga para abdi dalem panewu, mantri urdhênas yang memikul perlengkapan, Raden Mas Arya Bratadipura abdi dalem bupati anom carik kasepuhan.

Sampeyan dalêm inggang wicaksana sakalihan pramèswari dalêm kaparêng angéntosi wontên titihan, inggang ngadhêp putra dalêm Bandara Kangjêng Pangeran Arya Suryaamijaya, saha Kangjêng Radèn Mas Tumênggung Widaningrat, Radèn Mas Tumênggung Jayadipura, Radèn Tumênggung Sumadipura sarta Radèn Ngabèi Riya Atmosutiksna, ngampil songsong. Gusti Kangjêng Ratu Pambayun saha inggang raka Bandara Kangjêng Pangeran Arya Purbanagara punapadene inggang bakyu sapandhèrèkipun wau sami ngabêkti pasareanipun Kangjêng Susuhunan Giri,

sarampungipun sadaya, Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya malêbêt ing cungkup, kula katimbangan, lajêng dhawuh dhatêng pangulu mundhut pirsu dhuwung pusaka ingkang sumanggar wontên ngriku, pangulu amêndhêt pusaka wau, kapandhi lajêng ngadhêp, kèndêl sawatawis, lajêng munjuk punapa kaparêng kaunus, sarêng sampun kaparingan dhawuh kaparêng, pusaka kaunus, kapriksa, kula ugi kadhawuhan mariksa sarta nyatitèkakên.

Sri Paduka yang bijaksana beserta permaisuri diperkenankan menunggu di dalam kereta, yang menghadap ialah putra beliau Bandara Kanjeng Pangeran Arya Suryaamijaya, serta Kanjeng Raden Mas Tumenggung Widaningrat, Raden Mas Tumenggung Jayadipura, Raden Tumenggung Suma dipura dan Raden Ngabei Riya Atmasutiksna membawa payung kebesaran. Gusti Kanjeng Ratu Pambayun bersama kakandanya Bandara Kanjeng Pangeran Arya Purbanagara serta saudara perempuannya dan para pengiring semuanya bersembah di makam Kanjeng Susuhunan Giri. Setelah semuanya selesai, Bandara Kanjeng Pangeran Arya Adiwijaya masuk ke cungkup, saya dipanggil, lalu beliau memerintahkan kepada penghulu untuk mengambil pusaka keris yang tersimpan di tempat itu. Penghulu mengambil pusaka tersebut, lalu diserahkan, dan setelah menunggu beberapa saat, beliau mengajukan pertanyaan apakah diperkenankan untuk mengeluarkan pusaka itu. Setelah mendapat izin, pusaka itu dikeluarkan, diperiksa, dan saya pun diperintahkan untuk memeriksa serta mencatatnya.

Mênggah pusaka wau nama Kyai Sura Angun-angun, wujudipun:

Adapun nama pusaka tersebut adalah Kyai Sura Angun-angun, bentuknya sebagai berikut:

Luk tiga wêlas, kêmbang kacang, lambe gajah lamba, jalèn, grènèng ri pandhan, sogokan, pejetan, saweyan, lis gusèn, ada-ada, gänja sêbit lontar, sinarasah kamarogan, gänja pitu, tosan alus madhêt, sêkar adêg, mrambut, nanging awit saking rêgêd sangêt dados katingalipun këlêm, makatên ugi tosanipun dados kirang guwaya, kapetang taksih wêtah, namung luk ingkang angka 11 rasi rusak, tangguh Blambangan, nanging pangandikanipun Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya, dhawuh dalêm Sampeyan Dalêm Inkang Wicaksana Inkang Sinuhun Kangjêng Susuhunan tangguhhipun purwa.

Berluk tiga belas, bermotif kembang kacang, lambe gajah lamba, jalèn, grènèng ri pandhan, sogokan, pejetan, saweyan, lis gusèn, ada-ada, ganja sêbit lontar, sinarasah kamarogan, ganja pitu, terbuat dari besi halus pilihan, berhias sêkar adêg, memiliki serat

seperti rambut, namun karena sangat kotor sehingga tampak tertutup kotoran, demikian pula besinya menjadi kurang berkilau. Dihitung masih utuh, hanya pada lekukan yang ke-11 terdapat kerusakan pada bagian rasi. Bertanggung Blambangan, namun menurut keterangan Bandara Kanjeng Pangeran Arya Adiwijaya, sabda Sri Paduka Yang Bijaksana Kanjeng Susuhunan menyatakan bahwa tanggunya adalah purwa (zaman awal).

Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya andangu mênggah limrahipun tanggunipun dhatêng pundi, aturipun pangulu botên mangrêtos dhatêng tanggun, namung cariyosipun tiyang sêpuh punika iyanipun Sunan Giri ingkang kaping tiga.

Bandara Kanjeng Pangeran Arya Adiwijaya menanyakan bagaimana asal-usul atau kebiasaan penanggihan keris tersebut, jawaban penghulu mengatakan tidak mengetahui pasti tentang tanggunya, hanya menceritakan bahwa menurut orang tua-tua, keris itu adalah peninggalan Sunan Giri yang ketiga.

Dhuwung wau kinanipun asring kendran, mila sarêng kapanggih ingkang pungkasan, panyimpênipun dados têtanggêlanipun bupati ing Grêsik, sarana bêslitipun guprênur Jawi Lèr, Kangjêng Tuwan, ... katitimangsan kaping 27 Oktobêr 1772, suraos dhuwung wau salami-laminipun kêdah dados pusaka wontên pasarean Giri, bokmanawi punisa[4] sababipun anggèning botên kenging dipun cêpêng tiyang sanès, sabên wontên ingkang mriksani, ingkang ngunus inggih pangulu wau, dene prabotipun: sarungan wangun Ngayogyakarta, pêndhok kêmalo cêmêng. Panyimpênipun wontên pêthi manggèn salêbêting cungkup pasarean ingkang nglêbêt piyambak.

Keris tersebut dahulu sering berpindah tempat, hingga pada penemuan terakhir disimpan di kediaman Bupati Gresik, dengan perantaraan surat keputusan Gubernur Jawa Utara, Kanjeng Tuan ..., bertanggal 27 Oktober 1772. Menurut keterangan, keris itu untuk selama-lamanya harus menjadi pusaka di makam Giri, barangkali sebabnya karena tidak diperkenankan dipegang oleh orang lain; setiap kali ada yang memeriksa, yang menghunus adalah penghulu tersebut, adapun perlengkapannya: bersarung gaya Ngayogyakarta, pendhok (selongsong luar) berlapis kêmalo hitam. Tempat penyimpanannya berada dalam peti yang terletak di dalam cungkup makam bagian dalam.

Kutipan di atas menjelaskan tentang perjalanan Pangeran Pangeran Arya Adiwijaya, yang dilaporkan oleh sekretarisnya. Perjalanan sekretaris dimulai dari keputusan musyawarah Radya Pustaka Pangeran Arya Adiwijaya pada hari jumat ke 17 januari 1936. Perjalanan tersebut dilakukan untuk mengikuti perintah dari Pangeran Arya

Adiwijaya yang sedang menjenguk Bapak Gubernur Surakarta yang sedang sakit di Pantiroga Surabaya. Pangeran *Arya Adiwijaya* adalah putra dari Pakubuwana X. Di dalam naskah tersebut diceritakan tentang perjalanan ke hotel Oranje (sekarang Hotel Majapahit, Surabaya) dilanjutkan ke Giri. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan yang menyangkut masalah sosial, menyangkut masalah kepedulian terhadap sesama, dan menyangkut masalah tentang religi. Perjalanan tentang religi juga menyangkut masalah tentang kegiatan keislaman.

Analisis Nilai Budaya

Dalam kajian filologi kontemporer, teks manuskrip dipahami bukan sekadar sebagai dokumen historis, melainkan sebagai medium yang merekam sistem nilai dan pandangan dunia masyarakat pendukungnya¹⁵. Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” ini menggambarkan kepekaan terhadap tatanan sosial dan spiritual yang menjadi fondasi etika pemerintahan tradisional Surakarta. Salah satu nilai utama yang tampak ialah nilai kesetiaan dan tanggung jawab pejabat panitra terhadap perintah raja atau Bandara Kangiêng Pangeran Arya Adiwijaya. Panitra menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan ketulusan, mendokumentasikan seluruh perjalanan serta pemeriksaan pusaka tanpa mengabaikan rincian sekecil apa pun. Sikap tersebut mencerminkan konsep *manembah* (pengabdian), yang dalam budaya Jawa bermakna kepatuhan total dan kesetiaan kepada atasan sebagai wujud penghormatan sekaligus tanggung jawab moral. Dalam kerangka kebudayaan Jawa, struktur loyalitas dan hierarki ini menjadi bagian dari sistem nilai feodal yang menopang legitimasi kekuasaan tradisional¹⁶. Kesetiaan panitra ini memperlihatkan bagaimana birokrasi istana tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memelihara tatanan moral yang berakar pada konsep kekuasaan sakral¹⁷.

Selain itu, naskah panitra juga menonjolkan nilai kehormatan dan legitimasi yang melekat pada pusaka, terutama ketika menyebutkan pusaka keris Nagasasra yang bertanggung Pajajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pusaka tidak dipandang semata sebagai benda material, melainkan sebagai simbol spiritual dan kekuasaan yang

¹⁵ Zainal Arifin Nugraha, “Manuscripts and Philological Studies in Indonesia,” *Culturalistics: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies* 7, no. 1 (2023).

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 212–216.

¹⁷ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2007), 179.

menyatukan dimensi duniawi dan transendental. Dalam kebudayaan Jawa, pusaka seperti keris dipercaya mengandung *tuah* dan *wahyu keprabon*, yaitu daya spiritual yang menegaskan keabsahan seorang pemimpin¹⁸. Denys Lombard menjelaskan bahwa dalam kosmologi Jawa, benda pusaka memiliki posisi penting dalam jaringan simbol kekuasaan yang menghubungkan raja dengan legitimasi historis dan sakralitas tradisi¹⁹. Oleh karena itu, pemeriksaan pusaka oleh panitra bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga ritual penghormatan terhadap martabat dan kesinambungan legitimasi kebangsawanan.

Nilai penting lainnya adalah tata krama birokrasi dalam sistem kerajaan Surakarta. Panitra menjalankan tugasnya dengan urutan pelaporan yang teratur, penggunaan bahasa yang sopan dan berjenjang, serta pencatatan waktu yang sistematis. Tata krama atau *unggah-ungguh* menjadi pedoman utama dalam berinteraksi dan melaksanakan tugas, mencerminkan bahwa birokrasi istana berlandaskan etika sekaligus spiritualitas. Koentjaraningrat menegaskan bahwa sistem etika Jawa selalu menempatkan harmoni sosial sebagai prinsip utama dalam relasi kekuasaan dan masyarakat.²⁰ Pendekatan filologis modern terhadap manuskrip Nusantara juga menunjukkan bahwa struktur naratif dan pilihan bahasa dalam teks tradisional memuat nilai budaya yang terinternalisasi dalam praktik sosial.²¹ Naskah ini memperlihatkan keseimbangan antara kekuasaan dan moralitas, di mana pejabat bukan hanya pelaksana perintah, tetapi penjaga harmoni sosial dan spiritual.

Lebih jauh, kajian terhadap manuskrip Nusantara menekankan bahwa teks hasil transliterasi dan analisis filologis dapat mengungkap nilai spiritual dan simbolisme budaya yang tersembunyi dalam struktur narasi.²² Tradisi teks Jawa yang juga beririsan dengan praktik lisan dan spiritualitas kolektif menunjukkan bahwa dokumen birokrasi pun tidak terlepas dari dimensi religius dan kosmologis masyarakatnya.²³ Oleh sebab itu, nilai kesetiaan, kehormatan pusaka, dan tata krama birokrasi dalam naskah Panitra

¹⁸ Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855* (Jakarta: Gramedia, 2008), 103–106.

¹⁹ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II – Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 123–126.

²⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, 212–216.

²¹ Hani Siti Rukmanah, Ruhaliah, dan Nunuy Nurjanah, “Struktur Naratif dan Nilai Budaya dalam Wawacan Selarasa,” *Jaladri* 11, no. 1 (2025): 28–33.

²² Zainal Arifin Nugraha, “Manuscripts and Philological Studies in Indonesia,” *Culturalistics: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies* 7, no. 1 (2023)

²³ Muhammad Abdullah, Siti Rukayah, dan Heriyanto, “Revitalizing Javanese Islamic Literature: A Philological and Oral Tradition Study in Coastal Culture,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 13, no. 6 (2024).

Radyapustaka memperlihatkan bahwa birokrasi tradisional Jawa berfungsi tidak hanya untuk mengatur tata pemerintahan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara etika, kekuasaan, dan spiritualitas hingga masa kolonial akhir.²⁴

Relasi Politik Kesunanan Surakarta

Kunjungan Bandara Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya ke Surabaya pada tahun 1936, sebagaimana tercatat dalam naskah, dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi kebudayaan antarkerajaan pada masa kolonial. Perjalanan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan merupakan upaya simbolik untuk menjaga relasi politik dan kekerabatan antar daerah di Jawa penting dalam jaringan kekuasaan lokal saat di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Dalam konteks sejarah politik Jawa, relasi antarkerajaan sering kali dipelihara melalui simbol, ritus, dan pertukaran kehormatan sebagai sarana mempertahankan legitimasi di tengah dominasi kolonial.²⁵

Dalam hal ini, Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya bertindak sebagai representasi istana Surakarta yang membawa pesan kehormatan dan penghormatan budaya melalui jalur diplomatik nonformal. Diplomasi tersebut mencerminkan kesinambungan praktik politik tradisional Jawa yang menekankan hubungan kekerabatan simbolik dan solidaritas elite bangsawan. Denys Lombard menjelaskan bahwa dalam jaringan budaya Jawa, hubungan antarpusat kekuasaan tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau administratif, tetapi melalui sistem simbol dan ritus yang mengikat elite dalam satu kosmologi kekuasaan.²⁶ Kunjungan ini memperkuat legitimasi simbolik antara dua wilayah bangsawan Nusantara yang sama-sama berada dalam bayang-bayang kolonialisme.

Selain itu, pusaka berperan penting sebagai sarana mempererat jaringan antarkerajaan. Pemeriksaan, pendataan, dan penyebutan pusaka dalam Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” menunjukkan bahwa benda-benda tersebut tidak hanya dipandang sebagai warisan material, tetapi juga simbol spiritual dan politik. Dalam tradisi Jawa, pusaka merupakan sumber legitimasi kekuasaan

²⁴ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II – Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 123–126.

²⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2007), 179–182.

²⁶ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II – Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 123–126.

yang berhubungan dengan konsep *wahyu keprabon* dan kesinambungan genealogis.²⁷ Peter Carey menegaskan bahwa simbol-simbol sakral seperti pusaka berfungsi sebagai penguat otoritas moral bangsawan Jawa, bahkan ketika struktur politiknya telah mengalami tekanan kolonial.²⁸ Oleh karena itu, pusaka menjadi medium simbolik yang meneguhkan relasi diplomatik sekaligus memperlihatkan kesinambungan nilai kebangsawanan dalam tatanan kolonial yang semakin rasional dan administratif.

Perjalanan *Pangeran Arya Adiwijaya* ini juga memperlihatkan representasi kekuasaan lokal di bawah pengaruh kolonial. Meskipun secara administratif kedua wilayah berada dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, keduanya tetap memelihara otonomi simbolik melalui tradisi, tata krama, dan diplomasi budaya. M. C. Ricklefs menjelaskan bahwa pada awal abad ke-20, kerajaan-kerajaan Jawa mempertahankan identitas politik dan budayanya melalui strategi adaptasi terhadap sistem kolonial tanpa sepenuhnya melepaskan struktur simboliknya.²⁹ Strategi ini dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi antara kekuasaan tradisional dan struktur kolonial, di mana elite bangsawan mempertahankan martabatnya melalui praktik budaya seperti kunjungan resmi, pertukaran pusaka, dan pemeliharaan arsip istana.

Kajian terbaru mengenai manuskrip dan diplomasi budaya Nusantara juga menegaskan bahwa arsip perjalanan dan laporan resmi sering kali menjadi media representasi identitas lokal di tengah modernitas kolonial.³⁰ Selain itu, studi tentang relasi elite lokal di bawah kolonialisme menunjukkan bahwa praktik simbolik dan dokumentasi istana berfungsi sebagai sarana menjaga kesinambungan legitimasi budaya dalam sistem administrasi modern.³¹ Diplomasi kebudayaan yang tercermin dalam naskah Panitra Radyapustaka memperlihatkan bagaimana elite tradisional menggunakan nilai-nilai budaya sebagai instrumen mempertahankan identitas dan kekuasaan di tengah perubahan sosial-politik.

Secara keseluruhan, naskah ini mencerminkan jaringan simbolik kekuasaan dan budaya yang menjadi representasi dinamika sosial-politik awal abad ke-20. Diplomasi

²⁷ Denys Lombard, *Nusa Jawa*, 124.

²⁸ Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855* (Jakarta: Gramedia, 2008), 103–106.

²⁹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 180.

³⁰ Zainal Arifin Nugraha, "Manuscripts and Philological Studies in Indonesia," *Culturalistics: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies* 7, no. 1 (2023).

³¹ Muhammad Abdullah, Siti Rukayah, dan Heriyanto, "Revitalizing Javanese Islamic Literature: A Philological and Oral Tradition Study in Coastal Culture," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 13, no. 6 (2024).

budaya yang diwakili oleh Kangjêng Pangeran Arya Adiwijaya menunjukkan bahwa dalam sistem kekuasaan kolonial, kebudayaan tetap menjadi medium efektif untuk menjaga kehormatan dan solidaritas antarkerajaan. Naskah ini tidak hanya memiliki nilai historis sebagai arsip perjalanan, tetapi juga memuat makna budaya yang mendalam terkait strategi bangsawan Jawa dalam mempertahankan eksistensi simboliknya di tengah tekanan kolonialisme.

Analisis Teoretis Hibriditas Budaya dalam Naskah Panitra Radyapustaka (1936)

Dalam kerangka teori poskolonial yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha, konsep *hybridity* (hibriditas) menjelaskan bahwa identitas budaya tidak pernah bersifat murni atau statis, melainkan terbentuk melalui proses percampuran, negosiasi, dan interaksi antara dua atau lebih kekuatan dominan. Dalam konteks kolonial, hibriditas muncul dari relasi antara budaya penjajah dan budaya terjajah, yang melahirkan apa yang disebut Bhabha sebagai *third space* (ruang ketiga), yakni ruang simbolik tempat makna baru, identitas baru, dan bentuk kekuasaan baru dinegosiasikan.³² Hibriditas dalam pengertian ini bukanlah sekadar asimilasi, melainkan proses kreatif yang menghasilkan struktur kebudayaan baru tanpa sepenuhnya menghapus identitas asalnya.

Apabila teori ini diterapkan pada Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*”, maka naskah tersebut dapat dipahami sebagai produk budaya hibrid antara sistem birokrasi tradisional Jawa dan pengaruh administrasi kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Secara historis, Surakarta pada periode tersebut berada dalam situasi politik yang memperlihatkan dualisme kekuasaan: di satu sisi mempertahankan simbol dan struktur kerajaan, di sisi lain berada di bawah pengawasan dan regulasi administratif kolonial.³³ Dalam teks Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” tampak dua lapisan kekuasaan yang berjalan secara simultan.

Pertama, lapisan simbolik-tradisional yang menekankan kesetiaan (*manembah*), tata krama (*unggah-ungguh*), dan spiritualitas kerajaan Surakarta. Bahasa yang digunakan dalam laporan menunjukkan struktur hierarkis khas budaya keraton, dengan penegasan terhadap loyalitas kepada adipati dan penghormatan terhadap pusaka sebagai simbol legitimasi kekuasaan. Lapisan ini merepresentasikan kesinambungan kosmologi

³² Homi K. Bhabha, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), 36–39.

³³ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2007), 179–182.

Jawa yang menempatkan kekuasaan sebagai entitas sakral dan terhubung dengan wahyu serta garis genealogis historis.³⁴

Kedua, lapisan administratif-modern yang tampak dalam bentuk pencatatan sistematis, dokumentasi perjalanan, klasifikasi pusaka, serta penggunaan format laporan tertulis yang terstruktur. Model dokumentasi semacam ini memperlihatkan pengaruh rasionalitas birokrasi kolonial yang menekankan pencatatan tertulis, arsip, dan akuntabilitas administratif. Sejak abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem administrasi modern yang turut memengaruhi tata kelola kerajaan-kerajaan pribumi.³⁵ Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” mencerminkan adopsi teknik dokumentasi modern tanpa sepenuhnya meninggalkan kerangka simbolik tradisional.

Kedua lapisan tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan berbaur dan membentuk identitas baru kebudayaan Jawa kolonial. Dalam kerangka *third space* Bhabha, naskah ini dapat dibaca sebagai ruang hibrid tempat kekuasaan dinegosiasikan melalui bahasa dan simbol. Identitas birokrasi Jawa pada tahun 1936 bukan lagi sepenuhnya tradisional, tetapi juga bukan sepenuhnya kolonial. Ia menjadi bentuk kebudayaan transisional yang mempertahankan legitimasi simbolik keraton sekaligus beradaptasi dengan tuntutan administrasi modern.³⁶

Lebih jauh, praktik penghormatan terhadap pusaka, kesetiaan pada adipati, serta tata krama birokrasi yang tetap dijaga menunjukkan adanya strategi kultural dalam mempertahankan otonomi simbolik. Dalam perspektif poskolonial, hibriditas dapat berfungsi sebagai bentuk resistensi halus terhadap dominasi kolonial—bukan melalui konfrontasi terbuka, tetapi melalui pelestarian sistem nilai lokal dalam ruang administrasi yang telah dimodernisasi.³⁷ Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” tidak hanya merefleksikan adaptasi terhadap kolonialisme, melainkan juga memperlihatkan bagaimana budaya Jawa menegosiasikan modernitas kolonial tanpa kehilangan fondasi simboliknya.

³⁴ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II – Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 123–126.

³⁵ Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855* (Jakarta: Gramedia, 2008), 103–106.

³⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 212–216.

³⁷ Homi K. Bhabha, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), 112–115.

KESIMPULAN

Kajian filologis terhadap Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” memperlihatkan bahwa naskah ini memiliki nilai historis dan budaya yang penting bagi pemahaman hubungan diplomatis Kesunanan Surakarta pada abad ke-20. Melalui metode filologi deskriptif-analitis, naskah diteliti mulai dari identifikasi fisik, transliterasi, hingga analisis isi dan makna.

Secara deskriptif, naskah ini menggunakan bahasa Jawa Tengahan dengan gaya administratif kerajaan, mencakup struktur teks berupa pendahuluan (laporan pemeriksaan pusaka), isi perjalanan, dan penutup (laporan kepada pejabat tinggi). Di dalamnya terdapat istilah teknis seperti *grènèng*, *ganja*, *sarasah*, dan *dhapur Nagasasra* yang menunjukkan pengetahuan mendalam tentang dunia keris dan pusaka kerajaan. Secara analitis, teks ini menggambarkan fungsi administratif dan simbolik dalam sistem birokrasi budaya Surakarta, di mana pemeriksaan pusaka bukan sekadar aktivitas material, tetapi juga tindakan sakral yang meneguhkan legitimasi dan kontinuitas kekuasaan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa naskah Panitra Radyapustaka bukan hanya sumber arsip administratif, tetapi juga dokumen kebudayaan yang memperlihatkan dinamika sosial, politik, dan spiritual masyarakat Jawa pada masa transisi kolonial. Pendekatan filologi deskriptif-analitis membuka ruang bagi pelestarian naskah sebagai warisan intelektual bangsa serta pemahaman baru terhadap identitas budaya Nusantara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Sastra Lestari yang telah berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan website dokumentasi naskah Jawa. Keberadaan arsip digital yang dikelola oleh yayasan tersebut sangat membantu dalam proses penelusuran, akses, serta pelestarian naskah-naskah kuno yang menjadi sumber utama penelitian ini. Tanpa upaya digitalisasi dan dokumentasi yang dilakukan secara berkelanjutan, penelitian terhadap Naskah “*Palapuraning panitra nalika dhèrèk pangarsa tédhak Madura*” tentu akan menghadapi keterbatasan akses dan kendala teknis yang lebih besar. Kontribusi Yayasan Sastra Lestari (Yasri) dalam menjaga warisan budaya tulis Nusantara merupakan bentuk nyata pelestarian memori kolektif bangsa.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada dosen yang telah memberikan arahan, kritik konstruktif, serta bimbingan akademik selama proses penelitian dan penulisan artikel ini berlangsung. Saran-saran metodologis dalam bidang filologi, sejarah, dan kajian budaya sangat membantu penulis dalam memperdalam analisis serta memperkuat kerangka teoretis yang digunakan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan akademik dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk diskusi ilmiah, pertukaran gagasan, maupun motivasi selama proses penelitian. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tulisan ini, terutama dalam memperluas perspektif kajian dan memperkaya analisis terhadap nilai budaya serta dinamika relasi politik Kesunanan Surakarta.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan kajian filologi dan sejarah budaya Nusantara di masa mendatang.

REFERENSI

- Abdullah, Muhammad, Siti Rukayah, dan Heriyanto. "Revitalizing Javanese Islamic Literature: A Philological and Oral Tradition Study in Coastal Culture." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 13, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0187>.
- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Carey, P. (2008). *Kuasa Ramalan: Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855*. Jakarta: Gramedia.
- Febriyanti, Fitri, dan M. S. Alawy. "Philological Analysis of Tafsiriyah Translations in Javanese Qur'an Manuscripts from a Nusantara Perspective." *Jurnal Lektur Keagamaan* 23, no. 1 (2025): 1–35. <https://doi.org/10.31291/jlka.v23i1.1240>.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian II – Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Nugraha, Zainal Arifin. "Manuscripts and Philological Studies in Indonesia." *Culturalistics: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/ca.v7i1.19005>.
- Nuranto, Irsyad Eko. (2010). *Sejarah Perkembangan Manajemen Museum Radyapustaka Tahun 1926–2008*. Universitas Sebelas Maret.
- Panemu, Dianto Sumangku. (2015). Kajian Struktural dan Nilai Religius dalam *Serat Palapuraning Panitra Nalika Dherek Pangarsa Tedhak Madura* karangan R.M.Ng. Prajakintaka. *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*, 6(5).
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Rohmah, Nurul Baiti, dan Uman Rejo. "Kajian Filologi dan Kearifan Budaya Lokal dalam Teks Manuskrip Keislaman *Layang Iman Sujana*." *SEMIOTIKA: Jurnal*

Ilmu Sastra dan Linguistik 25, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.19184/semiotika.v25i1.43815>.

- Rukmanah, Hani Siti, Ruhaliah, dan Nunuy Nurjanah. “Struktur Naratif dan Nilai Budaya dalam Wawacan Selarasa: Analisis Teks Naskah Kuno Hasil Transliterasi di Situs SiPena.” *Jaladri: Jurnal Ilmiah Program Studi Bahasa Sunda* 11, no. 1 (2025): 28–33. <https://doi.org/10.33222/jaladri.v11i1.4531>.
- Safi’i, M. “Tasawuf Jawa: Kajian Filologis terhadap Naskah *Suluk Ahya Ngulumodin*: Javanese Sufism: A Philological Study of *Suluk Ahya Ngulumodin*.” *Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 9, no. 2 (2025): 347–362. <https://doi.org/10.31002/transformatika.v9i2.2241>.
- Salse-Rovira, A., dkk. (2024). Universities, heritage, and non-museum institutions. *International Journal on Digital Libraries*, 25, 603–622.
- Sholehah, Nova Fitri Nur, F. A. Alfiana, L. N. F. Dewi, V. R. A. Wardani, dan A. A. Khoiri. “Ancient Manuscript Textology in the Archipelago: A Comparative Analysis of Objects, Languages, and Methods in Philological Studies.” *Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15294/sjsj.v13i2.28045>.



© 2026 by the authors. **Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization** is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

 <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2026.9.2.144-162>